



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

TUGAS DAN FUNGSI STRATEGI

**TAHUN
2024**

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung mempunyai tugas pokok mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah guna melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk menyelenggarakan kegiatan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningakatan kapasitas bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan teknis propinsi

1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini asyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.
- c. Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.



- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekertaris
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- f. Bidang Politik Dalam Negeri
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)

- a. Kepala Badan

Membawahi :

- 1) Sekretaris
- 2) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- 3) Bidang Politik Dalam Negeri
- 4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
- 5) Bidang Kewaspadaan Nasional
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjafung)
 - a) Jafung Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 - b) Jafung Perencana Ahli Muda
 - c) Jafung Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - d) Jafung Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik dan Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu
 - e) Jafung Ketahanan Seni dan Budaya, Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi



f) Jafung Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing dan Penanganan Konflik

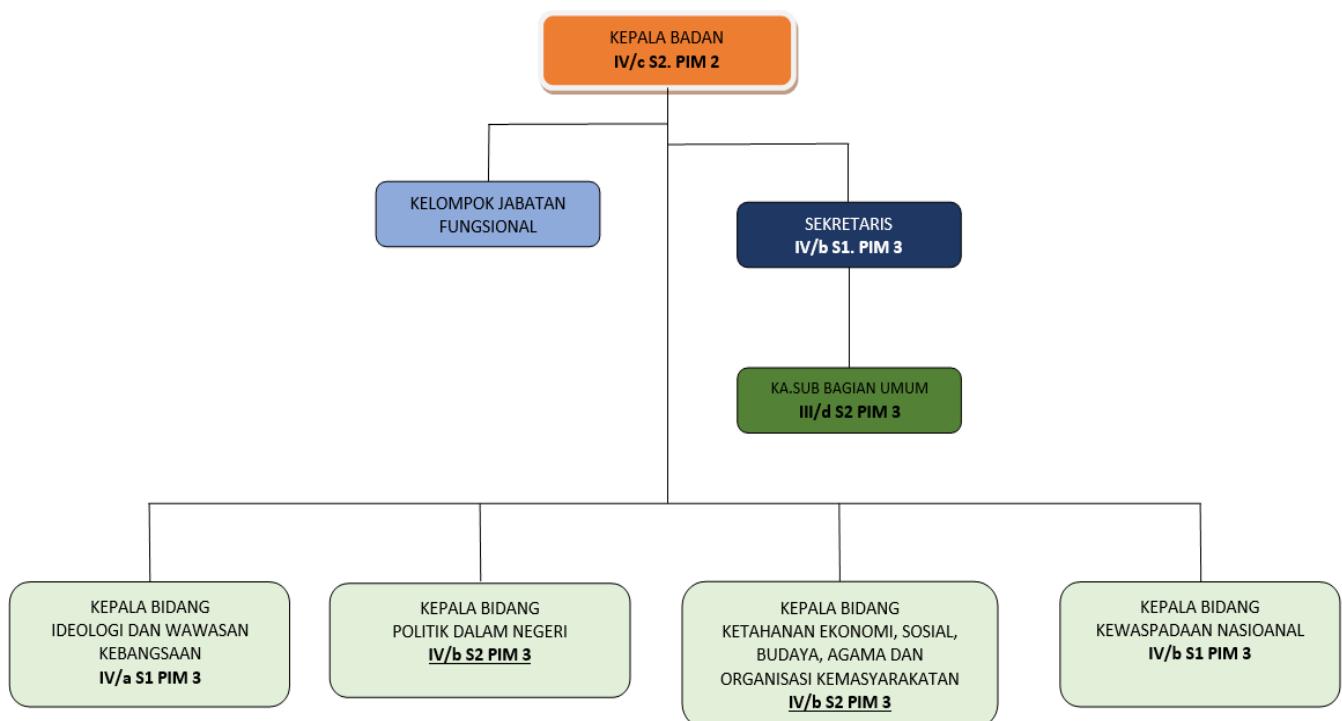
b. Sekretaris

membawahi :

1) Subbag Umum dan Kepegawaian

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA





Uraian Tugas

a. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas yaitu :

Memimpin, membina dan mengkoordinasikan serta mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan penyusunan perumusan perencanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik khususnya teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan menyelenggarakan kegiatan penetapan kegiatan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian peningkatan kapasitas bina ideologi dan wawaan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi serta politik dalam negeri sesuai norma, standar, prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku searah kebijakan umum daerah.

- 2) Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembinaan, pengawasan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik melalui peningkatan kapasitas aparatur, ketahanan idiologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, kewaspadaan dini masyarakat, penanganan konflik, pemantauan dan evaluasi perkembangan politik daerah.
 - b) Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni budaya dan agama, ORMAS, OKP, LSM, pendidikan politik, fasilitasi PEMILU Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif.
 - c) Perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan keuangan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah



sesuai tugas dan fungsinya serta kewenangannya.

b. Sekretaris Badan

- 1) Sekretaris Badan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, asset, penyusunan program, laporan dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan pelaksanaan program-program kegiatan kedinasan dan kesekretariatan serta penginformasian ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Membaca / meneliti / mempelajari seluruh surat masuk dan dokumen lainnya;
 - c) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian dokumen anggaran serta memparaf pertanggungjawaban terhadap sirkulasi dokumen keuangan untuk kelancaran penggunaan dan pengelolaan anggaran keuangan berdasarkan DPA;
 - d) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis kesekretariatan dan kerumahtanggaan serta teknis bidang-bidang;
 - e) Mengatur penyiapan dan pembinaan kegiatan perencanaan pengumpulan data dan pembuatan statistik kemajuan dalam pemberian pelayanan umum kesekretariatan dan kegiatan kedinasan lainnya;
 - f) Mengatur penyiapan dan pembinaan administrasi kepegawaian, kearsipan, pengadministrasian barang-barang inventaris, surat-menjurut serta penatausahaan seluruh perjalanan dinas;
 - g) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan program kesekretariatan dan



kerumahtanggaan Badan serta mengupayakan alternatif pemecahannya; sebagai saran dan masukan bagi pimpinan atas langkah dan tindakan yang diambil guna menunjang kelancaran tugas kedinasan bilamana ada perubahan kebijakan agar diajukan terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dan mendapat arahan labih lanjut;

- h) Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kajian dan kebijakan lebih lanjut serta sebagai bahan pertimbangan dalam Menyusun LKJiP.
- 3) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) sub bagian yaitu :
Subbag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a) Memberi arahan dan pembagian tugas bawahan selaku pengadministrasi agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar berjalan tertib, lancar dan terkendali;
 - b) Melaksanakan urusan surat-menurut pengetikan, penggandaan, kearsipan, dan pemeliharaan;
 - c) Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - d) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana berkenaan dengan urusan tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
 - e) Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa, dan kedudukan hukum pegawai;



- f) Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi : bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- g) Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan kedinasan serta fasilitasi lainnya;
- h) Melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
- i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Sekretaris sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa,

- 1) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- 2) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
 - a) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diarahkan oleh Kepala Badan;
 - b) Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi Ketahanan Ideologi Negara, Pelaksanaan Bela Negara, Penghayatan Nilai-



- nilai Sejarah Kebangsaan, pembinaan pembaruan dan kewarganegaraan sesuai arahan Kepala Badan yang merujuk pada kebijakan teknis Badan dan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selaras dengan kebijakan umum daerah;
- c) Melaksanakan pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup badan maupun unsur OPD terkait dalam mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksaaan kegiatan kedinasan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam kegiatan pembinaan yang berkaitan dengan Keprabadian Bangsa, Kewarganegaraan, Kepedulian Sosial dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan secara terpadu dan terkendali agar tetap kondusip sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diarahkan Kepala Badan selaras dengan kebijakan umum daerah;
 - d) Melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai pedoman dan petunjuk tehnis yang ditetapkan serta pemberian arahan dan pembagian tugas bawahan baik pejabat struktural maupun pegawai nonstruktural dan/atau pejabat fungsional baik sebagai fungsional tertentu maupun fungsional umum selaku pengadministrasi dan/atau selaku petugas operasional umum dan /atau tehnis agar dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga kegiatan program dapat berjalan lancar, sinergis dan terintegrasi dengan program umum Badan;
 - e) Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan Program wasbang serta mengupayakan alternatif pemecahannya sebagai saran masukan



atas langkah dan tindakan yang diambil dalam menunjang kelancaran tugas, bilamana ada perubahan kebijakan agar terlebih dahulu dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dan arahan lebih lanjut;

- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berjenjang, pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas - tugas teknis dan non teknis aparatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil kenerja Badan;
- h) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kepala Bidang Pendidikan Politik Dalam Negeri,

- 1) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
- 2) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan program strategi bidang Politik terkait Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik serta Kelembagaan Partai Politik dan fasilitasi Pemilu;



- b) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemantauan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Politik Dalam Negeri;
- c) Menyusun rencana kerja dan program operasional kerja dalam melaksanakan perhimpunan peraturan yang berkaitan dengan bidang Politik Dalam Negeri;
- d) Menyiapkan, merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemfasilitasi, monitoring dan evaluasi dalam Pengimplementasian Kebijakan Publik, Kelembagaan Kemasyarakatan dan Partai Politik, Pendidikan Budaya Politik Dalam Negeri;
- e) Mengkoordinasikan sinkronisasian dan harmonisasi baik dengan unsur lingkup Badan maupun dengan unsur OPD terkait dan unsur Instansi Vertikal lainnya dalam upaya mengaktualisasikan dan pengintegrasian perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan kedinasan di bidang Politik Dalam Negeri;
- f) Mengkoordinasi monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala atau pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan Menyusun hasil kinerja OPD;
- g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



e. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Dan Organisasi Kemasyarakatan,

- 1) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas dan ormas asing.
- 2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
 - b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
 - c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
 - d) Pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan



Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;

- e) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah kota;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional,

- 1) Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota.
- 2) Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
 - b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;



- c) Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
- d) Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota;
- e) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kota; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TABEL 3.2
**TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I S/D TRIWULAN IV
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA**
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Urusan/ Bidang Urusan	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaihan Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)							
				Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K	Rp	Sumber Dana TW 2	K	Rp	Sumber Dana TW 3	K	Rp	Sumber Dana TW 4	K	Rp	(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)								
						TW 1	TW 1	TW 2	TW 2	TW 3	TW 3	TW 4	TW 4	TW 4				K (%)	Rp (%)							
8			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda																							
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100%	109.571.289.157		12,8	6.203.988.653		203	53.478.040.601		377	18.361.325.108		69,8	28.021.677.415	132,51%	106.065.031.777	132,51%	96,80%					
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					4.098.611.600			218.011.600			267.781.900			1.433.588.000		1.581.194.160		3.500.575.660		85,41%			
8	1	2		Percentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	100%				37,2			47,4			86,7			0		171,27		171,27%				
8	1	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				4.098.611.600			218.011.600			267.781.900			1.433.588.000		1.581.194.160		3.500.575.660		85,41%			
8	1	2	2.01		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1000 Orang			200			350			350			100		1000		100%		100%		
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.405.751.600	PAD		84.741.600	PAD		45.140.000	PAD		119.160.000	PAD		992.743.801		1.241.785.401		88,34%	
8	1	2	2.01	4	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1200 Orang			154			671			1300			0		2125		177,08%		177,08%		
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				112.180.000	PAD		- PAD			20.549.900	PAD		12.720.000	PAD		21.853.300		55.123.200		49,14%	
8	1	2	2.01	5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Laporan			2			2			2			2		8		100%		100%		
8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				100.680.000	PAD		- PAD			75.460.000	PAD		- PAD		-		75.460.000		75.460.000		74,95%
8	1	2	2.01	7	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen			2			2			0			0		4		100%		100%		
8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka				2.380.000.000	PAD		133.270.000	PAD		126.632.000	PAD		1.301.708.000	PAD		566.597.059		2.128.207.059		89,42%	
8	1	2	2.01	8	Jumlah Paskibraka	300 orang			404			40			0			0		444		148%		148%		
8	1	2	2.01	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				100.000.000	PAD		- PAD			- PAD			- PAD		-		0		0		
8	1	2	2.01	11	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 orang			0			0			0			0		0		0		0		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				171,27%	85,41%					
Predikat Kinerja																				SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 2)																				171,27%	85,41%					
Predikat Kinerja																				SR	SR					

Kode Urusan/ Bidang Urusan			Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Kinerja dan Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	
					Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K TW 1	Rp TW 1	Sumber Dana TW 2	K TW 2	Rp TW 2	Sumber Dana TW 3	K TW 3	Rp TW 3	Sumber Dana TW 4	K TW 4	Rp TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			78.268.572.387		3.926.022.117		49.818.837.310		14.365.103.952		8.155.631.528		76.265.594.907		76.265.594.907		97,44%					
8	1	3		Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%			0		11,3		52,6		20,7		84,59		84,59%		84,59%					
8	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		78.268.572.387		3.926.022.117		49.818.837.310		14.365.103.952		8.155.631.528		76.265.594.907		76.265.594.907		97,44%					
8	1	3	2.01	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1000 Orang			30		320		400		250		1000		100%		100%					
8	1	3	2.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		62.811.729.387	PAD		501.566.014	PAD	48.802.487.215	PAD	12.070.196.090	PAD	919.259.635		62.293.508.954		62.293.508.954		99,17%				
8	1	3	2.01	2	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen			0		10		0		0		10		100%		100%				
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		13.914.843.000	PAD		3.264.956.103	PAD	636.590.095	PAD	1.930.283.662	PAD	6.893.732.716		12.725.562.576		12.725.562.576		91,45%			
8	1	3	2.01	4	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10000 Orang			0		1130		5260		2069		8459		84,59%		84,59%				
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1.542.000.000	PAD		159.500.000	PAD	379.760.000	PAD	364.624.200	PAD	342.639.177		1.246.523.377		1.246.523.377		80,84%			

Kode Urusan/ Bidang Urusan			Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Kinerja dan Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
					Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K	Rp	Sumber Dana TW 2	K	Rp	Sumber Dana TW 3	K	Rp	Sumber Dana TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)			
8	1	4	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					468.600.000			35.027.220			146.624.000			51.982.450			31.220.000		264.853.670		264.853.670	56,52%
8	1	4		Percentase jumlah ormas yang di berdayakan	100%			0,24			100			25			20		145,24		145,24%		145,24%		
8	1	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				468.600.000			35.027.220			146.624.000			51.982.450			31.220.000		264.853.670		264.853.670	56,52%
8	1	4	2.01	Jumlah Ormas yang dibina	25 Ormas				6			6			6			7		25		100%		100	
8	1	4	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				420.000.000	PAD		29.904.720	PAD		140.504.000	PAD		16.032.500	PAD		31.220.000		217.661.220		217.661.220	51,82%
8	1	4	2.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 Orang			0			600			150			120		870		145%		145%		
8	1	4	2.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				48.600.000	PAD		5.122.500	PAD		6.120.000	PAD		35.949.950	PAD		-		47.192.450		47.192.450	97,10%
8	1	4	2.01	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Laporan			0			11			8			6		25		100%		100%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							145,24%	56,52%	
Predikat Kinerja																							SR	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 4)																							145,24%	56,52%	
Predikat Kinerja																							SR	SR	

Kode Urusan/ Bidang Urusan			Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Kinerja dan Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)						
						Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K TW 1	Rp TW 1	Sumber Dana TW 2	K TW 2	Rp TW 2	Sumber Dana TW 3	K TW 3	Rp TW 3	Sumber Dana TW 4	K TW 4	Rp TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				1.643.950.000			62.380.900			541.885.900			384.071.022			537.293.433		1.525.631.255		1.525.631.255		92,80%	
8	1	5		Percentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	100%				0			66,67			91,7			16,7			175		175%		175%	
8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1.643.950.000			62.380.900			541.885.900			384.071.022			537.293.433		1.525.631.255		1.525.631.255		92,80%	
8	1	5	2.01	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	40 Laporan				2			13			15			10			40		100%		100	
8	1	5	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			173.950.000	PAD		3.375.500	PAD		87.436.400	PAD		1.700.000	PAD		56.460.000		148.971.900		148.971.900		85,64%	
8	1	5	2.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang				0			400			550			100			1050		175%		175%	
8	1	5	2.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			1.470.000.000	PAD		59.005.400	PAD		454.449.500	PAD		382.371.022	PAD		480.833.433		1.376.659.355		1.376.659.355		93,65%	
8	1	5	2.01	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 Laporan				2			8			9			6			25		100%		100%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																								175% 92,80%		
Predikat Kinerja																								SR SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 5)																								175% 92,80%		
Predikat Kinerja																								SR SR		

Kode Urusan/ Bidang Urusan			Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Kinerja dan Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)					
							Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K	Rp	Sumber Dana TW 2	K	Rp	Sumber Dana TW 3	K	Rp	Sumber Dana TW 4	K	Rp	K (%)	Rp (%)							
8	1	6	8	1	6	2.01				TW 1	TW 1		TW 2	TW 2		TW 3	TW 3		TW 4	TW 4		K	Rp						
8	1	6	8	1	6	2.01	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				17.232.882.948			109.600.000			389.338.534			633.101.945			15.823.302.233			16.955.342.712		16.955.342.712	98,39%
8	1	6	8	1	6	2.01	Percentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	100%			5			99,8			11			0			115,8		115,80%		115,80%		
8	1	6	8	1	6	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				17.232.882.948			109.600.000			389.338.534			633.101.945			15.823.302.233			16.955.342.712		16.955.342.712	98,39%
8	1	6	8	1	6	2.01	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 Kasus			5			6			7			6			24		100%		100		
8	1	6	8	1	6	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				664.882.500	PAD		47.474.000	PAD		288.414.534			40.542.000			262.075.000			638.505.534		638.505.534	96,03%
8	1	6	8	1	6	2.01	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1000 Orang			50			998			110			0			1158		115,80%		116%	
8	1	6	8	1	6	2.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				130.230.000	PAD		10.290.000	PAD		-	PAD		5.940.000	PAD		89.139.000			105.369.000		105.369.000	80,91%
8	1	6	8	1	6	2.01	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		14 Laporan			2			4			5			0			11		78,57%		79%	
8	1	6	8	1	6	2.01	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				16.437.770.448	PAD		51.836.000	PAD		100.924.000	PAD		586.619.945	PAD		15.472.088.233			16.211.468.178		16.211.468.178	98,62%
8	1	6	8	1	6	2.01	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen			2			5			5			0			12		100%		100%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																						115,80%	98,39%						
Predikat Kinerja																						SR	SR						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 6)																						115,80%	98,39%						
Predikat Kinerja																						SR	SR						

Kode Urusan/ Bidang Urusan	Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2024)			Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4			Realisasi Kinerja dan Anggaran (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)			
			Target	Rp	Sumber Dana TW 1	K TW 1	Rp TW 1	Sumber Dana TW 2	K TW 2	Rp TW 2	Sumber Dana TW 3	K TW 3	Rp TW 3	Sumber Dana TW 4	K TW 4	Rp TW 4	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
8 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.858.672.222			1.852.946.816			2.313.572.957			1.493.477.739			1.893.036.061		7.553.033.573		7.553.033.573		96,11%	
8 1 1		Nilai IKM	76,70 Nilai			21,3			22			16,7			27,6		87,6		100%		100%		
8 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200.000.000			63.010.000			34.325.000			46.379.480			53.303.000		197.017.480		197.017.480		98,51%	
8 1 2.01	Nilai Akip		80,3 nilai			31,5			20			16,7			12,1		80,3		100%		100%		
8 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000.000	PAD		30.490.000	PAD		26.425.000	PAD		19.485.000	PAD		23.600.000		100.000.000		100.000.000		100,00%	
8 1 2.01 1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen				0			2			1			2		5		100%		100%		
8 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000.000	PAD		3.960.000	PAD		5.210.000	PAD		17.539.480	PAD		20.708.000		47.417.480		47.417.480		94,83%	
8 1 2.01 6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				0			0			1			0		1		100%		100%		
8 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000	PAD		28.560.000	PAD		2.690.000	PAD		9.355.000	PAD		8.995.000		49.600.000		49.600.000		99,20%	
8 1 2.01 7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan				1			0			0			0		1		100%		100%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100% 98,51%
Predikat Kinerja																							SR SR
8 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.812.723.984			1.664.435.066			1.956.991.973			1.399.720.109			1.587.159.946		6.608.307.094		6.608.307.094		97%	
8 1 2.02	Jumlah Laporan	7 laporan				2			2			3			0		7		100%		100%		
8 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.632.227.768	PAD		1.413.685.066	PAD		1.553.245.343	PAD		1.176.250.109	PAD		1.303.044.458		5.446.224.976		5.446.224.976		96,70%	
8 1 2.02 1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan				65			0			0			0		65		100%		100%		
8 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.130.496.216	PAD		250.750.000	PAD		386.965.130	PAD		220.950.000	PAD		258.064.236		1.116.729.366		1.116.729.366		98,78%	
8 1 2.02 2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen				8			12			10			10		40		100%		100%		
8 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			50.000.000	PAD		-	PAD		16.781.500	PAD		2.520.000	PAD		26.051.252		45.352.752		45.352.752		90,71%	
8 1 2.02 5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan				1			2			1			1		5		100%		100%		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100% 97%
Predikat Kinerja																							SR SR
8 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			478.670.840			89.391.750			301.540.696			42.915.580			30.313.450		464.161.476		464.161.476	0	96,97%	
8 1 2.06	Jumlah laporan	12 laporan				3			3			3			3		12		100%		100%		
8 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.999.100	PAD		-	PAD		-	PAD		-	PAD		5.697.000		5.697.000		5.697.000		94,96%	
8 1 2.06 1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket				3			3			3			3		12		100%		100%		
8 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			197.640.000	PAD		9.740.000	PAD		187.900.000	PAD		-	PAD		-	197.640.000		197.640.000		100,00%		
8 1 2.06 2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket				1			1			2			1		5		100%		100%		
8 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.651.000	PAD		10.080.000	PAD		5.880.000	PAD		4.560.000	PAD		3.832.000		24.352.000		24.352.000		98,79%	
8 1 2.06 4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket				3			3			3			3		12		100%		100%		
8 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			42.999.740	PAD		21.427.750	PAD		17.623.350	PAD		-	PAD		3.752.450		42.803.550		42.803.550		99,54%	
8 1 2.06 5	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket				1			1			1			1		4		100%		100%		

